

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pelestarian

Tinjauan pelestarian berisikan mengenai pengertian pelestarian dan kriteria-kreteria pelestarian, dan akan dibahas secara rinci pada sub bab berikut,

2.1.1 Pengertian Pelestarian

Pengertian pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lestari yang artinya adalah tetap selama-lamanya, tidak berubah, secara luas pelestarian memiliki definisi pelestarian sebuah upaya yang berdasar dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukung, baik dari dalam maupun dari luar hal yang dilestarikan, sebenarnya banyak definisi dari pelestarian karna para ahli memiliki definisi yang berbeda, pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tertulis bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya, atau menurut A.W. Widjaja tahun 1986, mengartikan bahwa pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif, dan berbagai definis lain mengenai pelestarian berdasarkan pendapat, dapat dilihat di tabel 2.1

Tabel 2. 1 Definis Pelestarian

Pendapat	Definisi Pelestarian
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010	pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya
Kepmendikbud Republik Indonesia Nomor 063/U/1995	Upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusai atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan benda cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan, dan penertiban
Piagam Burra	konsep proses pengelolaan suatu tempat atau ruang atau obyek agar makna kultural yang terkandung didalamnya terpelihara dengan baik
Chaedar, 2006: 18	pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini di sebut juga factor - faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi atapun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing- masin
Danisworo (1995)	konservasi adalah upaya untuk melestarikan, melindungi serta memanfaatkan sumber daya suatu tempat, seperti gedung-gedung tua yang memiliki arti sejarah atau budaya, kawasan dengan kepadatan penduduk yang ideal, cagar budaya, hutan lindung dan sebagainya

A.W. Widjaja (1986)	Mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif
---------------------	---

Sumber : Undang-undang, KepMen, piagam Burra, Danisworo, Widjaja, Chaedar

Berdasarkan definisi yang telah diungkapkan oleh para pakar terkait dengan pelestarian, definisi secara umum tentang pelestarian adalah upaya untuk melestarikan, melindungi, suatu hal agar dapat terjaga keberadaanya.

2.1.2 Kriteria Pelestarian

Menetapkan suatu obyek pelestarian harus ada dasar kriteria pemilihannya terlebih dahulu, tidak harus seluruh kriteria yang ada ditetapkan secara sekaligus, namun apabila sesuatu atau beberapa kriteria dianggap perlu untuk diterapkan, maka proses dan prosedur penilaian harus dirumuskan secara seksama. Menurut Attoe (1979), kriteria-kriteria yang digunakan dalam melestarikan suatu obyek antara lain adalah

A. Kriteria-kriteria Fisik/Fisual

1. Estetika, yaitu berkaitan dengan nilai keindahan arsitektural, khususnya dalam hal penampakan luar bangunan, yaitu :
 - a. Bentuk (sesuai dengan fungsi bangunannya)
 - b. Struktur (ditonjolkan sebagai nilai estetis)
 - c. Ornamen (mendukung dari gaya arsitektur bangunan)
2. Keluar biasaan, yaitu berkaitan dengan nilai keistimewaan, keunikan dan kelangkaan bangunan, yaitu:
 - a. Sebagai landmark lingkungan
 - b. Sebagai landmark kawasan
 - c. Sebagai landmark kota
 - d. Kelangkaan bangunan (gaya arsitektur umum, dominan, atau satu-satunya)
 - e. Umur bangunan
 - f. Skala Monumental (berdasarkan bangunan dan ruang luar)
 - g. Perletakan yang menonjol (terhadap lingkungan maupun bangunan di sekitarnya)
3. Memperkuat citra kawasan, berkaitan dengan pengaruh kehadiran suatu obyek terhadap kawasan sekitarnya yang sangat bermakna untuk meningkatkan atau memperkuat kualitas dan citra lingkungan :
 - a. Sesuai dengan fungsi kawasan
 - b. Kesatuan / kontinuitas

- c. Kekontrasan bangunan
4. Keaslian bentuk, berkaitan dengan tingkat perubahan bentuk fisik, baik melalui penambahan atau pengurangan :
 - a. Jumlah ruang
 - b. Element struktur
 - c. Konstruksi
 - d. Detail/Ornamen
5. Keterawatan, berkaitan dengan kondisi fisik bangunan :
 - a. Tingkat kerusakan
 - b. Prosentasi sisa bangunan
 - c. Kebersihan

B. Kriteria-kriteria Non Fisik

1. Peran sejarah, berkaitan dengan nilai sejarah yang dimiliki, peristiwa penting yang mencatat peran ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah dan babak perkembangan suatu lokasi, sehingga merujuk pada :
 - a. Sejarah Perkembangan Arsitektur
 - b. Sejarah Perkembangan Kota
 - c. Sejarah Perjuangan Bangsa
2. Komersial, berkaitan dengan nilai ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan, dilihat dari aspek formal dan informal.
3. Sosial budaya, berkaitan dengan nilai-nilai sosial-budaya khas kawasan yang masih terwujud dan terwadahi :
 - a. Legenda
 - b. Aktivitas social-budaya

2.2 Tinjauan Pusaka

Tinjauan pusaka pada sub bab ini akan menjelaskan tentang pengertian, definisi pusaka berdasarkan buku pedoman dan tinjauan para ahli, dan juga kriteria-kriteria mengenai pusaka.

2.2.1 Pengertian Pusaka

Pusaka adalah peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah, mengandung kualitas pemikiran, rencana dan pembuatannya, serta memiliki peran yang sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Ada pula yang mewakili gaya arsitektur yang khas pada suatu masa. Pusaka, dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Poerwadarminto, berarti heritage

(bahasa Inggris). Perkembangan pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu pada artefak tunggal, dalam dua dekade terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu saujana (cultural landscape) yang luas bahkan bisa lintas batas wilayah serta menyangkut persoalan pusaka alam dan budaya. Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) bekerjasama dengan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003. Piagam ini merupakan yang pertama dimiliki Indonesia dalam menyepakati etika dan moral pelestarian pusaka sebagai berikut

- a. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendirisendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu;
- b. Pusaka budaya mencakup pusaka berwujud dan pusaka tidak berwujud;
- c. Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan, karena itu harus dilestarikan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang;
- d. Pelestarian adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.

2.2.2 Kriteria Pusaka

Ruang lingkup pusaka memang sangat luas bahkan secara fisik, pusaka saujana budaya bisa menjangkau wilayah yang sangat luas pula. Jangkauannya bisa melebihi batas administrasi suatu perwilayahan apakah lintas kabupaten, propinsi atau negara, hingga pusaka budaya intangible yang maya, tidak kasat mata, dengan kata lain, pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja. Pusaka terkait erat dengan komponen peninggalan lingkungan hidup yaitu abiotik (alam dan buatan), biotik (flora dan fauna), serta sosial-budaya. Dan komponen pusaka dapat berbentuk tunggal ataupun kelompok, berskala kecil tingkat lokal seperti rukun tetangga hingga desa, kota pusaka atau pulau, juga dari yang

sangat bersahaja hingga budaya tingkat tinggi, serta dari makanan tradisional hingga candi Borobudur – candi Budha terbesar di dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003, Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, budaya dan gabungan antar keduanya yang disebut pusaka saujana.

A. Pusaka Budaya Ragawi (Tangible Cultural Heritage)

Pusaka budaya ragawi adalah semua pusaka budaya yang mempunyai raga atau berbentuk benda. Secara garis besar pusaka budaya ragawi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pusaka budaya ragawi bergerak dan pusaka budaya ragawi tak bergerak, sebagai berikut:

1. Pusaka budaya ragawi bergerak adalah pusaka budaya ragawi yang dengan mudah dapat dipindah-tempatkan. Contoh adalah area, keramik perabot rumah tangga, tekstil, kereta, foto, dan masih banyak lagi.
2. Pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah pusaka ragawi yang tidak dapat dipindah tempatkan tanpa mengubah atau merusak pusaka-pusaka budaya ragawi yang dimaksud. Pusaka ini memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lokasi keberadaannya. Apabila dipisahkan dari lokasi keberadaannya, nilai dan makna pusaka budaya ragawi tersebut menjadi berubah, bahkan dapat hilang sama sekali. Termasuk di dalam kategori pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah pusaka bangunan dan monumen.

B. Pusaka Budaya Tak Ragawi (Intangible Cultural Heritage)

Pusaka budaya tak ragawi adalah suatu kekayaan masa lalu yang sifatnya abstrak, tidak berwujud secara fisik, tetapi mengandung nilai, manfaat, makna, keahlian, dll. yang sangat tinggi dan berharga bagi kehidupan. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menegaskan bahwa warisan budaya adalah situs warisan budaya, kota pusaka, saujana budaya, situs alam sakral, pusaka budaya bawah laut, museum, pusaka budaya bergerak, kerajinan, dokumentasi pusaka secara digital, pusaka sinematografi, tradisi oral, bahasa, festival, religi dan kepercayaan, musik dan lagu, seni pertunjukkan, obat tradisional, literatur, kuliner tradisional, dan olahraga tradisional. Sebagian besar dari warisan budaya tersebut merupakan pusaka budaya tak ragawi, yaitu tradisi oral bahasa, proses kreasi kemampuan dan pengetahuan, seni pertunjukkan, festival, religi dan kepercayaan, kosmologi, serta sistem pembelajaran dan kepercayaan serta praktek-praktek kepercayaan yang terkait dengan alam.

C. Pusaka Alam (Natural Heritage)

Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Bentuk-bentukan secara alami tersebut memiliki karakter yang khas, saling berhubungan dan terus berkembang.

D. Pusaka Saujana (Cultural Landscape Heritage)

Pusaka saujana merupakan produk kreativitas manusia dalam merubah bentang alam dalam waktu yang lama sehingga didapatkan keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia. Menurut UNESCO, ada beberapa kriteria sebuah kawasan dianggap sebagai pusaka saujana. Kriteria tersebut antara lain:

1. Kawasan dengan karakter unik, yang tidak ditemukan ditempat lain;
2. Kawasan yang menjadi mahakarya (masterpiece) dari ciptaan yang jenius, di bidang arsitektur, seni monumental, perencanaan kota atau bentangalam;
3. Kawasan dengan tradisi budaya tinggi;
4. Kawasan yang menggambarkan tingginya peradaban dan sejarah manusia;

2.3 Partisipasi Masyarakat

Secara umum, Pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, melakukan interaksi sosial, saling berinteraksi dalam kegiatan yang dilakukan tiap saat.

2.3.1 Konsep Partisipasi Masyarakat

Secara sederhana definisi dari partisipasi adalah keterlibatan, maka partisipasi masyarakat akan bermakna keterlibat masyarakat dalam melakukan kegiatan, banyak pendapat mengenai definisi partisipasi masyarakat, berikut merupakan definisi partisipasi yang telah dijelaskan oleh para ahli,

Tabel 2. 2 Definisi Partisipasi Masyarakat

Ahli	Definisi partisipasi masyarakat
Canter (dalam Arimbi, 1993:1)	partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut
Mubyarto (1997:35)	partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.
Sumodingrat (1988)	Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Sumodingrat menambahkan, bahwa parasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap pembangunan
Suryono (2001:124)	partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan
Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40)	Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang

	dilakukan
Isbandi (2007:27)	Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Dedi Supriadi, (2001: 201-202)	partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.
Mikkelsen (1999: 64)	Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
Pasaribu dan Simanjuntak	partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan.

Sumber: Center, Mubyarto, Sumodingrat, Suryono, Handayani, Isbandi, Dedi, Mikkelsenc

Berdasarkan berbagai definis yang telah dijelaskan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan bentuk keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sadar pada kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat.

2.3.2 Bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, dan partisipasi sosial.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak atau tidak berwujud). Bentuk partisipasi yang nyata adalah harta benda yang dapat berupa uang ataupun peminjaman fasilitas dan barang, partisipasi keterampilan dan tenaga dalam kegiatan partisipasi, sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, dan partisipasi sosial.

Untuk memperjelas definisi dari bentuk partisipasi maka digunakan teori yang dikemukakan oleh Pasaribu dan Simanjuntak (1986:2) membagi bentuk partisipasi menjadi lima jenis bentuk partisipasi yaitu partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan-kemahiran dan sosial. Berikut merupakan deskripsi kelima bentuk partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi buah pikiran

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, masukan masukan mengenai segala keberlangsungan program yang direncanakan, baik untuk menyusun program

maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya

2. Partisipasi tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan langsung atau terjun langsung kelapangan membantu menjalankan program yang sedang dijalankan untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

3. Partisipasi harta benda :

Partisipasi materi adalah bentuk memberikan sejumlah harta maupun benda yang berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan program partisipasi, memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan partisipasi harta benda juga dapat dilakukan dengan memberikan sumbangan uang, peminjaman benda kebutuhan kegiatan, peminjaman fasilitas ketika kegiatan partisipasi berlangsung.

4. Partisipasi keterampilan-kemahiran

Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya, partisipasi jenis ini diberikan orang untuk mendorong anggota masyarakat yang belum memiliki keterampilan dalam menjalankan program.

5. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial diberikan seseorang sebagai tanda paguyuban atau kerukunan, seperti halnya, turut hadir dalam kegiatan arisan, membantu berjalannya kegiatan koperasi, menghadiri kematian, memberikan kepercayaan pada masyarakat yang diberikan kepercayaan untuk memimpin kelompok atau komunitas, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka memberikan motivasi

Dari kelima bentuk partisipasi tersebut terlihat bahwa banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan sebuah partisipasi yang dalam kajian ini adalah partisipasi dalam Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.

2.3.3 Faktor-Faktor Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun

ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri personal individu dengan peran serta.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian, lama tinggal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, terdiri dari:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya, kelompok umur juga akan mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap sesuatu hal, dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas sehingga akan memunculkan golongan usia tua dan muda yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Faktor usia tentunya memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berperan serta. Beberapa temuan menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam suatu kelompok atau organisasi.

2. Jenis kelamin

Partisipasi dari kaum laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu hak akan berbeda. Hal ini terjadi karena adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan pada derajat yang berbeda. Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya,

suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Faktor pendidikan dianggap penting karena melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat pendidikan dan peran serta.

4. Pekerjaan

Pekerjaan dan yang baik dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. Sedangkan faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok serta berpengaruh pada mobilitas individu.

5. Penghasilan

Tingkat pendapatan mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Besarnya biaya investasi yang akan dilakukan oleh masyarakat tidak semata-mata bergantung kepada kemampuan menanamkan uangnya, tetapi juga pada keuntungan dan kepuasan dari apa yang akan mereka dapatkan dari investasi tersebut. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka

6. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Suatu kelompok pada suatu wilayah bukan merupakan jumlah anggotanya saja, akan tetapi mempunyai suatu ikatan psikologis. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan lingkungan di sekitarnya, dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang berpengaruh pada besarnya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama. Akhirnya lama waktu tinggal pada suatu daerah juga akan mempengaruhi partisipasi seseorang terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Seseorang yang sudah lama tinggal di sekitar benda cagar budaya akan

mempunyai partisipasi yang berbeda dengan orang yang belum lama tinggal di tempat tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa makin lama seseorang tinggal di kawasan cagar budaya maka tingkat partisipasinya akan berbeda mengingat rutinitas yang dijalani sehari-hari melihat benda-benda cagar budaya akan mempertinggi tingkat kekagumannya.

Tabel 2. 3 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi
Faktor Internal Angell (dalam Ross, 1967: 130)

Usia
Jenis Kelamin
Pendidikan
Pekerjaan
Penghasilan
Lama tinggal

Sumber : Ross

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

2.3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga keberadaan warisan budaya sehingga dapat terwujud pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan. Menurut Person dan Sullivan dalam Try (2017) terdapat beberapa tahapan dalam pelestarian cagar budaya, yaitu:

1. Identifikasi dan deskripsi mengenai situs cagar budaya

2. Interpretasi terhadap situs cagar budaya
3. Perencanaan dan membuat kebijakan tentang upaya pelestarian cagar budaya
4. Implementasi kebijakan yang telah ditetapkan Monitoring terhadap berbagai perencanaan dan implementasi kebijakan pelestarian Sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai partisipasi masyarakat.

Dalam tahapan pelestarian cagar budaya yang telah disebutkan diatas keterlibatan masyarakat dalam tahap indentifikasi dan interpretasi situs cagar budaya yaitu dapat berperan sebagai informan. Sedangkan dalam tahapan perencana hingga monitoring kegiatan pelestarian, masyarakat dapat terlibat dalam suatu pertemuan perencanaan sebagai narasumber, peserta, dan kelompok sumber daya yang memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan. Dalam tahapan implentasi kebijakan dan kegiatan pelestarian cagar budaya yang akan dilakukan berupa pembelajaran teoritis dan praktik secara langsung dalam menangani persoalan di lapangan. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan suatu proses yang harus direncanakan dan diciptakan dengan cara diadakannya pemberdayaan masyarakat terkait dengan kegiatan pelestarian cagar budaya. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan, seminar, pengumpulan dana, dan kegiatan lain untuk pelestarian cagar budaya. Setelah dilakukannya beberapa tahapan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelestarian yang telah direncanakan sebelumnya. Serangkaian kegiatan tersebut akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan cagar budaya sehingga tercipta pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.

2.4 Tinjauan Khusus

2.4.1 Pelestarian pada Kota Surabaya

Sejak awal berdiri kota sudah memiliki sejarah panjang terkait dengan nilai-nilai perjuangan, maka tidak salah bila Kota Surabaya disebut dengan Kota Pahlawan, Kota Surabaya memiliki sejarah cukup panjang sebelum akhirnya memperoleh kebebasan, cerita mengenai nilai kepahlawanan dimulai dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan Pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan di tahun 1293, pertempuran ini sangat berarti bagi warga Surabaya hingga tanggal tersebut diabadikan menjadi tanggal berdirinya Kota Surabaya, yakni tanggal 23 Mei, cerita kepahlawanan masyarakat Surabaya dilanjutkan dengan pertempuran 10 November yang dimana masyarakat Surabaya dengan semangat membara melawan pasukan sekutu bersenjata canggih meskipun masyarakat Surabaya kala itu hanya berbekal bambu runcing, meskipun puluhan ribu masyarakat gugur dalam

berperang namun semangat kepahlwannya patut dibanggakan, dengan banyaknya cerita kepahlwanan di Kota Surabaya maka tidak heran bila banyak pula bangunan-bangunan bersejarah sebagai saksi bisu masyarakat dalam merebut kemerdekaan, nilai-nilai kepahlwanan tersebut harus selalu diingat dan diterapkan oleh generasi muda, namun perkembangan jaman, pertembuhan ekonomi dapat mengikis nilai-nilai tersebut, kebutuhan ekonomi yang sangat meningkat membuat bangunan tersebut diubah guna meningkatkan nilai ekonomi, dan kesadaran masyarakat yang mulai rendah dalam melindungi cagar budaya, membuat pemerintah kota Surabaya turun tangan berkomitmen untuk melindungi nilai sejarah kota Surabaya, dengan mengeluarkan peraturan, kebijakan, hingga intensif pada tiap bangunan bersejarah, berikut merupakan peraturan Kota Surabaya terkait cagar budaya

Tabel 2. 4 Peraturan Mengenai Pelestarian Kota Surabaya

Peraturan	Tentang
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005	Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya menyatakan bahwa pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, melindungi dan memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan, serta memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya demi kepentingan pembangunan
Surat Keputusan Walikotamadya Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996	61 obyek bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya
Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/004/402.1.04/1998	Merevisi jumlah bangunan cagar budaya dari 61 objek menjadi 163

Sumber : Peraturan Kota, dan SK Wali Kota

2.4.2 Kebijakan yang berkaitan dengan Kawasan Sunan Ampel Surabaya

Wilayah lokasi studi Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Kota Surabaya, pada tahun 1998 kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya menjadi salah satu cagar budaya yang harus dijaga keberadaannya, keputusan tersebut ditetapkan semenjak terbitnya Surat Keputusan Walikotamadya, tidak hanya menjadi cagar budaya Kawasan Religi Sunan Ampel merupakan kawasan wisata karna terdapat salah satu makam dari sembilan wali penyebar agama islam di pulau jawa, dengan potensi yang dimiliki oleh Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya, maka munculah kebijakan-kebijakan yang ditunkan oleh pihak pemerintah guna melindungi kawasan ini,

Tabel 2. 5 Peraturan Mengenai Pelestarian Kawasan Ampel

Peraturan	Tentang
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Pasal 16	Tentang Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Pasal 53	Pengembangan kawasan daya tarik budaya
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Pasal 68	Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya
Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/004/402.1.04/1998	Merevisi jumlah bangunan cagar budaya dari 61 objek menjadi 163
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya tahun 2016-2021	Perlindungan wisata budaya, heritage dan religi baik obyek maupun kegiatannya sebagai salah satu tujuan utama wisata kota

Sumber : Peraturan provinsi Jatim, dan Kota surabaya, SK wali kota, RPJM Kota Surabaya.



2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Nurchalis /2011	Pelestarian Keraton Alwatzikhoebillah Sebagai Daya Tarik Wisata Sejarah Sambas Kalimantan Barat	Mengidentifikasi Potensi, Faktor-Faktor Yang Mendorong Wisatawan Berkunjung dan Mengetahui Upaya Serta Peran Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat dalam Menjaga dan Melestarikan Keraton Alwatzikhoebillah Sebagai daya tarik wisata Sejarah di Kabupaten Sambas	Faktor pendorong kunjungan wisatawan,	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	1) potensi mendasar yang menjadi sumber daya budaya Keraton Alwatzikhoebillah Sambas sebagai daya tarik wisata sejarah berupa arsitektur fisik, nilai-nilai sejarah dan perjuangan, perkembangan dan pembangunan sosial budaya, warisan budaya Melayu dan benda cagar budaya serta nilai sakral/ spiritual masyarakat Sambas; 2) faktor-faktor yang mendorong wisatawan datang mengunjungi Keraton Alwatzikhoebillah Sambas baik intrinsik maupun ekstrinsik didorong oleh motif refreshing/liburan, pendidikan, ingin tahu dan memperluas wawasan, sosial/interpersonal, budaya dan sakral/spiritual; 3) upaya dan peran serta pemerintah melestarikan Keraton Alwatzikhoebillah Sambas berupa pendanaan, promosi baik tingkat lokal maupun nasional serta upaya pemugaran terhadap keraton.	Peneliti mempelajari mengenai pelestarian keraton sebagai bangunan cagar budaya, namun peneliti tidak menggunakan aspek pariwisata dalam pelestarian, dan juga mneliti mengenai partisipasi masyarakat yang berada di lokasi penelitian.
2	FebrieG Setiaputra, AB Putrantyo, E Wardaniyah, W Tri Julianto, F Syahyudin Jurusan	upaya pelestarian situs glingseran sebagai sumber sejarah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar situs berdasarkan	(1) untuk menyelamatkan dan melestarikan BCB yang ada di wilayah Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, sebagai salah satu bukti	Bentuk partisipasi masyarakat	wawancara, dan praktik lapang	(1) masyarakat di Desa Glingseran dapat mengetahui, mengenal, dan memahami bahwa pemerintah telah memberlakukan undang-undang tentang pelestarian BCB, (2) Situs Glingseran dan beberapa BCB menjadi lebih bersih, (3) dengan dipasangnya papan penanda BCB, papan peringatan, dan papan penunjuk	Pada penelitian ini, peneliti mempelajari mengenai bentuk partisipasi, namun dalam penelitian yang dilakukan penelitian juga melihat hubungan

<p>Sejarah, Universitas Jember, Jember /2005</p>	<p>undang-undang nomor 5 tahun 1992</p>	<p>otentik sejarah dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif, (2) untuk memberi penyuluhan tentang arti penting BCB kepada masyarakat dan aparat pemerintah di Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, agar tercipta kepedulian atas benda-benda tersebut, (3) untuk memasyarakatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992</p>	<p>arah situs, diharapkan pengunjung akan ikut berpartisipasi dalam pelestarian situs.</p>	<p>antara bentuk dengan faktor yang meletar belakang masyarakat melakukan partisipasi.</p>	
<p>3 Tri Ananda rahman</p>	<p>Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru Di Yogyakarta</p>	<p>Mengetahui arahan partisipasi masyarakat jogja.</p>	<p>Partisipasi Metode Deskriptif dan faktor anlisis delphi partisipasi masyarakat kotabaru</p>	<p>Mengetahui arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kotabaru Di Yogyakarta</p>	<p>Pada penelitian ini penliti mempelajari mengenai metode deskriptif, yang menjadi pembedaan pada penelitian ini adalah, peneliti tidak menggunakan analisis delphi.</p>

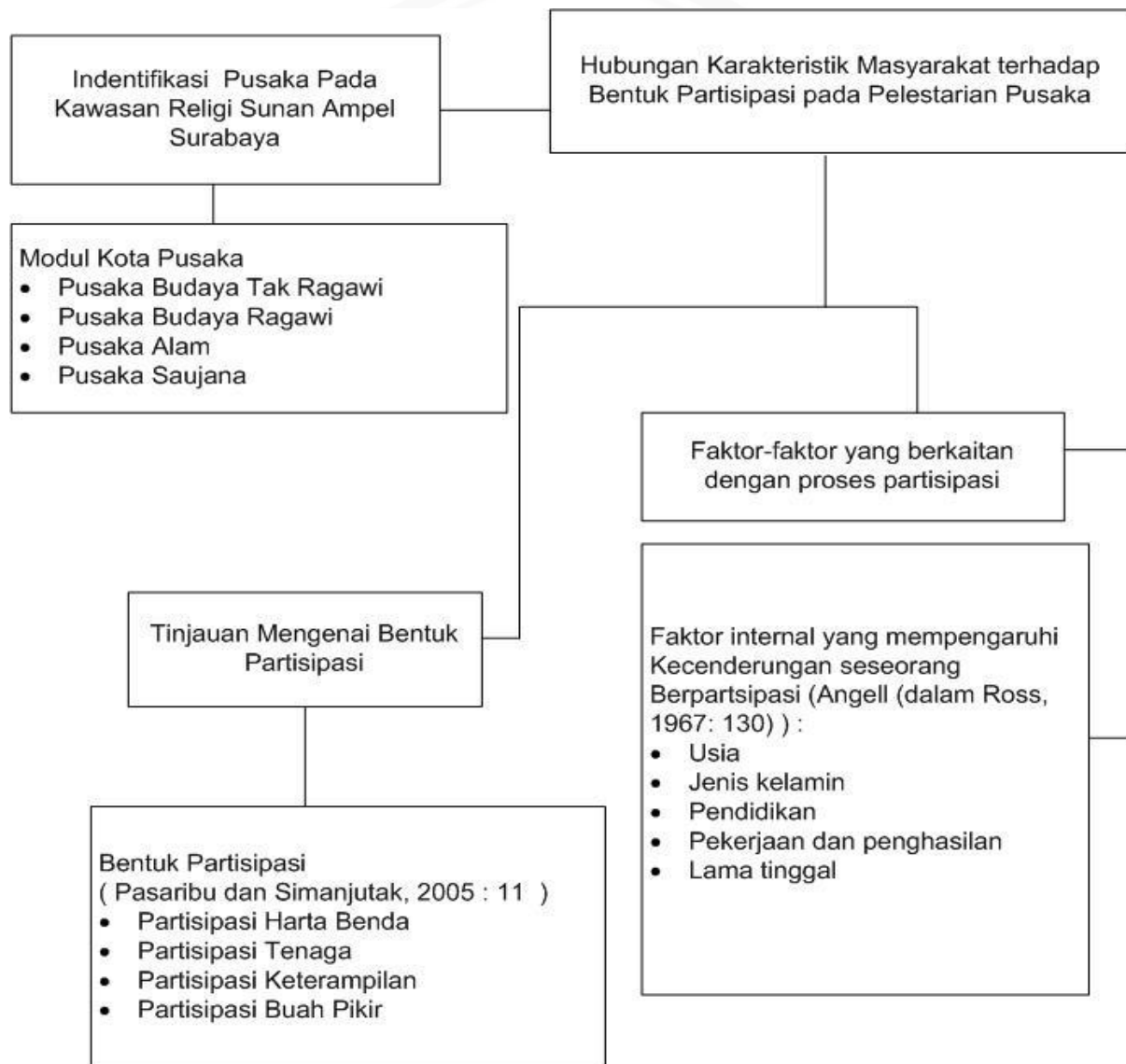
4	Khilda Wildana Nur/2010	Revitalisasi kawasan pecinan sebagai pusaka kota (urban heritage) makassar	Merumuskan Panduan Revitalisasi Kawasan Pusat Orientasi (Nodes) Sebagaimana Karakteristik Kawasan Pecinan Serta Meningkatkan Vitalitas Kawasan Sebagai Pusaka Kota Makassar	Macam pusaka, identifikasi pusaka	Metode Kuliitatif, Penelitian Deskriptif, Pendekatan Historis	Memberikan gambaran tentang revitalisasi kawasan pusat orientasi (nodes) sebagaimana karakteristik Kawasan Pecinan serta meningkatkan vitalitas kawasan sebagai pusaka kota Makassar	Peneliti mempelajari mengenai pusaka kota, metode kualitatif, namun yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat pada pusaka.
5	Harianti, M. Pd. V. Indah Sri Pinasti, M. Si. Sudrajat, S. Pd. /2007	Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Sekitar Candi Terhadap Candi Dan Upaya Pelestariannya	mengetahui persepsi masyarakat sekitar candi terhadap candi dan sekaligus partisipasi mereka dalam upaya perlindungan dan pelestarian candi.	Faktor pendorong partisipasi	triangulasi	Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas penduduk yang tinggal di sekitar candi memiliki persepsi yang salah mengenai candi sehingga masyarakat kurang	Dalam penelitian ini peneliti mempelajari mengenai faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan partisipasi, yang membedakan adalah penelitian tidak menggunakan metode triangulasi

Sumber : Nurcholis, Febri G, Tri, Khilda, Haria.

2.6 Kerangka Teori

Dari hasil kajian teori yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diketahui indikator penelitian untuk menentukan variabel dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, dilakukan kajian pustaka tentang jenis-jenis partisipasi masyarakat yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya.

Faktor pada bagian ini diperoleh berdasarkan kajian literatur para ahli, kemudian dilakukan sintesa pada masing-masing faktor untuk mendapatkan variabel-variabel yang termasuk dalam bentuk partisipasi masyarakat dan yang digunakan untuk mencapai sasaran penelitian yang dapat terlihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Sumber : Berbagai Literatur